

DAFTAR PUSTAKA

- AFIFAH, M. N. (2019). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA) (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta).
- Armaini, R. (2017). Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 6(1), 57-67.
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85-94.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, 2(1), 63-76.
- Anggraini, R., Hasanah, N., Fauzi, A., & Utamingtyas, T. H. (2018). Peningkatan Pemahaman Guru-Guru SMK melalui Pelatihan Akuntansi Pemerintah Guna Menyiapkan SDM Instansi Pemerintah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 2(2), 338-354.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344.
- Fajar Panuluh, G. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Hardani, S.Pd., M.Si., dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV, Pustaka Ilmu Group.

- Heru Cahyono, Nyimas Latifah Letty Aziz, dkk. 2020. *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta : LIPI Press, anggota Ikapi.
- Hadi, R. R. (2019). *Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat: Study kasus Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi pemerintahan. *Bogor: In Media*.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 19(2), 323-340.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 86-101.
- Jaya, I., Humaizi, H., & Achmad, N. (2020). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. *PERSPEKTIF*, 9(2), 252-262.
- JANNAH, M. (2021). *PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA DI KECAMATAN KAYUAGUNG* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Kartika, A., Yasintha, P. N., Wiwin, K., & Wismayanti, D. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara). *Jurnal Citizen*, 1(1), 1-9.

- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Andi, 2018), hal. 18-12 Tulis S. Meliala, dkk., Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, (Jakarta: Penerbit Semeta Media, 2007), hal. 4-13 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 15-14 Monika Handayani, Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan dan Jawaban, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Poliban Press, 2019), hal. 1
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). *Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh*. Muhammadiyah University Yogyakarta.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(1), 57-66.
- Miranda, P., & Akmal, A. (2019). Transparansi Penggunaan Dana Desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education*, 2(4), 412-418.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.
- Mohamad A, & Akbar, DS. 2014 *Pegantar Akuntansi 1*.
- Nordiawan, Dedi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 51-62.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.

- Pebrianti, G. M. (2021). *PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARKAT DI DESA SUMOBITO (STUDI KASUS PADA DESA SUMOBITO KECAMATAN SUMOBITO)* (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).
- Oman Rusmana, Dyah Setyaningrum, Yuliansyah, dan Maryani. 2017. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung : ALFABETA, cv
- Prof. Dr. Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA, cv
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (IASK)*, 3(2), 79-90.
- Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rondonuwu, B. C., Lapian, M. T., & Kairupan, J. K. (2017). Akuntabilitas Kinerja Aparat Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Rahajeng, M. M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 163-174.
- Ramadana, C. B. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).
- Suliyanto, D. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri Senduro Kabupaten Lumajang.
- Siregar, O. K. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 1 Tanjungbalai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(2), 57-71.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, 7(2), 139-148.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52-66.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di

Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.*

Wahyudi, N. (2018). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMK NEGERI 2 LUMAJANG.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.